HARIAN UMUM NusaBali

Tanah SMAN 1 Mengwi Belum Bersertifikat

Proses pengajuan sertifikat sudah sejak tahun 1979. Salah satu kendalanya, ada pihak yang mengklaim tanah SMAN 1 Mengwi adalah milik pribadi.

MANGUPURA, NusaBali

Tanah SMA Negeri 1 Mengwi ternyata belum bersertifikat. Sebetulnya penyertifikatan tanah seluas sekitar satu hektare itu sudah diproses, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian. Masalah penyertifikatan tanah terungkap dalam penyerapan aspirasi Komisi III DPRD Badung, Selasa (23/6), di sekolah tersebut.

Kepala SMAN 1 Mengwi Made Oka Haryana, menyatakan, proses penyertifikatan tanah sudah dilakukan sejak dirinya belum menjabat kepala SMAN 1 Mengwi. Konon, sejak tahun 1979 sampai sekarang sekolah belum memiliki sertifikat tanah. "Artinya sudah 36 tahun SMAN 1 Mengwi belum memiliki sertifikat atas tanahnya," ungkapnya.

Akibat kendala tidak adanya sertifikat itu lah sekolah banyak dirugikan. Salah satu contoh yang dibeber Haryana adalah tidak terpilihnya SMAN 1 Mengwi sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Padahal pengajuannya sudah lebih dahulu ketimbang SMAN 1 Kuta Utara kala itu. Walaupun kini RSBI itu sudah dihapus.

"Waktu pengajuan RSBI itu yang paling kami rasakan, hanya karena kelengkapan administrasi, karena waktu itu yang diminta adalah sertifikat tanah, sementara sertifikatnya tidak ada, kami tak terpilih," beber Haryana. "Setiap sekolah diminta proposal dan diminta melampirkan sertifikat tanah, kalau sudah begitu kami tidak bisa berbuat banyak," tandasnya.

Karena amat penting sertifikat tanah tersebut, pihaknya berharap pemerintah dan pihak terkait lainnya mengupayakan secepat mungkin sehingga sertifikat tanah bisa lekas keluar.

Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria menyesalkan sertifikat tanah itu belum keluar. "Hal ini mesti ditindaklanjuti secara serius agar nantinya tidak menjadi batu sandungan Kabupaten Badung untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI di masa mendatang," ujarnya.

Menurut politisi asal Mengwi itu, Kabupaten Badung dalam meraih opini WTP sangat sulit karena ada beberapa aset belum banyak tercatat secara administratif. Mengenai masalah ini pihaknya menegaskan akan memfasilitasi kepentingan sekolah. "Dengan bagian aset, BPN, ini harus ada komunikasi," tegasnya.

Kendati lahan tersebut sudah

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015
Hal : 2

HARIAN UMUM
NusaBali

sesuai secara de facto, tapi jika penyertifikatannya belum selesai, lahan tersebut belum sah secara de jure. "Kami mendesak pihak eksekutif agar segera mencarikan solusi mengenai hal ini. Jika tidak diselesaikan secepatnya hal ini ditakutkan akan berdampak keraguan di masyarakat, apakah lahan ini benar milik Pemkab Badung atau bukan," tegas Satria.

Sementara Kabag Aset dan Perlengkapan Pemkab Badung I Wayan Puja tak menampik kondisi yang dialami SMAN 1 Mengwi. "Mengenai lahan tersebut memang sudah menjadi milik Pemkab Badung, namun belum selesai penyertifikatannya," akunya. "Kami komunikasikan ke pihak BPN Badung supaya dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan penyertifikatan tersebut dapat segera dilakukan," tandasnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung I Gede Sukardan Ratmasa, secara terpisah mengaku kaget dengan masalah ini. Ia juga baru mengetahui jika luas lahan yang sekitar 1 hektare itu ternyata masih ada masalah, karena ada warga di sana yang mengklaim milik pribadi.

"Oleh karena demikian harus tuntas dulu masalahnya. Bila sudah *clear* dan *clean*, baru bisa diproses lebih lanjut pensertifikatannya," kata dia.

Menurut dia, penjelasan dari pihak desa adat memang sudah ada tetapi diakui baru sepihak yang menyatakan bila tanah di sana adalah milik desa adat. Sementara lima orang warga yang konon keberatan belum dimintai penjelasan. "Yang lima orang itu punya bukti apa soal kepemilikan tanah di sana. Itu juga harus kita dengar. Kami mengharapkan agar menyelesaikan masalah itu dulu. Kalau masalahnya sudah selesai bisa diproses," tegasnya.

Nah, berkenaan dengan itu pihaknya mengharapkan pemerintah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Sehingga bila masalah ini tuntas proses penyertifikatan tanah bisa lebih cepat. **as**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Penerima Bansos Terancam *Blacklist*

• NUSABALI/NATA

Rapat koordinasi pembahasan bantuan hibah dan Bansos dipimpin langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (kiri) di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (23/6).

SEMARAPURA, NusaBali

Para penerima bantuan sosial (baksos) hibah di Klungkung yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemanfaatan bantuan, terancam kena blacklist (catatan peringatan).

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pemanfaatan dana bansos dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (23/6). Rapat dihadiri Wabup Klungkung Made Kasta, Plt Sekkab Ida Bagus Sudarsana dan pimpinan SKPD di Klungkung.

Usai pertemuan, Kabag Kesra Setda Klungkung I Wayan Winata menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK Bali, banyak penerima dana bansos belum melaporkan LPJ kepada Pemkab. "Ini bukan temuan, tetapi catatatan dari BPK," jelas Winata.

Karena itu, lanjut Winata, Pemkab akan mempertimbangkan kembali pemberian hibah kepada pihak-pihak yang tak menyampaikan LPJ tersebut. Namun, dia tidak merinci organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan yang belum menyetorkan LPJ. Dia menampik, tak adanya LPJ itu karena penerima bansos hibah ini tak tahu tentang sistematika LPJ dan pemberitahuan dari Pemkab. "Beh...Kami sudah wanti-wanti kepada para penerima dana bansos ini. Sudah kita sampaikan," tegas Winata. Oleh karena itu, kata dia, tidak ada istilah para penerima bansos hibah tidak paham ketentuan penyampaian LPJ.

Sementara berdasarkan catatan BPK Bali, ada sebanyak 1.477 penerima hibah pada tahun 2014 yang belum ada LPJ-nya kepada Pemkab. Nilai hibahnya Rp 39 miliar lebih. BPK juga mencatat, 164 penerima hibah tahun 2013, kembali mendapatkan hibah tahun 2014 dengan nilai Rp 9 miilar lebih. Masih pada tahun 2014, sebanyak 33 penerima hibah mendapatkan hibah beruntun.

Sementara, Permendagri No 39/2012 tentang Perubahan Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos, pemberian hibah tidak membenarkannya adanya pemberian hibah ganda atau berturut-turut.

Dalam rapat koordinasi pembahasan bansos hibah tersebut, Bupati I Nyoman Suwirta, meminta organisasi sosial atau lembaga kemasyarakatan penerima hibah mematuhi ketentuan tersebut. Mulai dari pengajuan permohonan atau proposal dilakukan lebih awal, sebelum pembahasan oleh Tim Pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Semua permohonan dan proposal yang masuk ke SKPD agar ditindaklanjuti, dicermati dan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari. "Penerima hibah wajib membuat Surat Pertanggungjawaban SPJ/LPJ," ujarnya.

"Saya tidak mau ada organisasi penerima bansos hibah, tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan masyarakat," tegas Suwirta. **k17**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 6

Radar Bali

Tiga Ranperda Akhirnya Diserahkan

AMLAPURA - DPRD Karangasem, menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Karangasem, Selasa (23/6). Agenda paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, kemarin, yakni penyerahan tiga ranperda (rancangan peraturan daerah) oleh Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg. Diantaranya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Karangasem tahun 2014, Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Karangasem Sejahtera, dan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Karangasem.

Terkait pelaksanaan APBD tahun 2014, Bupati Geredeg menyebutkan, realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp 1,2 triliun lebih, atau 102,07 persen dari seluruh rencana anggaran pendapatan. Lebih rinci, Bupati Geredeg membeberkan, anggaran pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan APBD tahun 2014 sebesar Rp 202 miliar, lebih. Realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 239 miliar lebih. Tercatat melebih target sekitar Rp 36,6 miliar. Selain itu, juga ada pendapatan dari bagian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. "Anggaran belanja untuk tahun 2014 sebesar Rp 1,1 triliun lebih," jelas Bupati Geredeg.

Terkait ranperda penyertaan modal kepada PT Karangasem Sejahtera, Bupati Karangasem, dua periode ini, mengatakan bahwa penyertaan modal itu, adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. Jumlahnya dirancang sebesar Rp 40 juta. Penyertaan modal itu, tegas Bupati Geredeg sebagai bukti pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah. Sedangkan penyertaan modal pada PDAM Karangasem dirancang sebesar Rp 2,4 miliar, lebih. **(wan/gup)**

KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

KI-KA: I Wayan Geredeg bersalaman dengan I Nengah Sumadi kemarin.

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 25

Radar Bali

Undiksha Ditetapkan Tiga Tersangka

Total Lima Tersangka

DENPASAR – Kasus dugaan korupsi atas kasus di Undiksha, memasuki babak baru. Sebelumnya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu atas nama NM selaku makelar dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IWS, kemarin sore sekitar pukul 17.00, Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso dan Aspidsus Kejati Bali Herna Norma mengumumkan bahwa ada penambahan tersangka.

Ada tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka lagi. Momock mengatakan sebelumnya Aspidsus Gede Sudharma sudah menghasilkan dua tersangka dalam kasus ini. "Setelah Pak Sudharma pindah, diganti dengan Ibu Herna, nambah tersangka lagi 3. Jadi, lima tersangka saat ini," ungkapnya sambil menunjukkan tangannya dengan maksud lima orang.

Dia juga mengatakan, penetapan tiga tersangka ini sudah melalui proses. Yaitu sudah gelar perkara atau ekspose. "Sudah melalui proses, jadi sudah resmi ada penambahan tiga tersangka. Kami intinya masih fokus atas kasus Undiksha ini," imbuhnya. Namun saat diwawancarai di Lobby Kejati Bali kemarin, Momock mengatakan untuk nama – nama masih rahasia. Bahkan tidak mau menyebutkan inisialnya. "Nama jangan dulu, inisialnya juga jangan dulu," pungkasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini sudah memeriksa 30 saksi. Sebelumnya Kasus Undiksha kasus ini sudah ditangani oleh Polda Bali. Sebelumnya Subdit III Reskrimsus Polda Bali kembali melakukan pemanggilan terhadap dua orang anggota Tim Pengadaan Tanah Uni-

"Sudah melalui proses, jadi sudah resmi ada penambahan tiga tersangka. Kami intinya masih fokus atas kasus Undiksha ini."

Momock Bambang Sumiarso, *Kajati Bali*

versitas Pendidikan Ganesha (Undhiksa) Singaraja. Mereka yang dipanggil adalah Prof. Dr. Wayan Rai dan Ida Bagus Emaharta. Keduanya dihadirkan sebagai saksi atas dugaan adanya *mark up* tanah yang dilakukan beberapa oknum dosen dan pegawai Undiksha. Namun kasus ini juga ditangani oleh Kejati Bali. Sampai akhirnya Kejati Bali menetapkan dua tersangka.

Kasus yang diusut Polda dan Kejati ini adalah, terkait pembelian lahan tanah seluas 15 hektare di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Saat ditemui koran ini di Lingkungan Mapolda Bali, Prof. Dr. Wayan Rai mengatakan jika dirinya hanya ditanyakan terkait masalah kronologi pembentukan tim pengadaan tanah tersebut.

Selebihnya dia mengatakan bahwa dirinya menjawab awal pembentukan tim tersebut atas perintah Rektor Undiksha Prof. Nyoman Sudiana. Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut di markup menjadi Rp 20 juta per are. Sehingga ada indikasi negara dirugikan puluhan miliar.

Sementara itu kemarin juga memeriksa Sekprov Bali, yaitu Cok Pemayun. Cok

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015
Hal : 31

Radar Bali

diperiksa atas kasus dugaan korupsi dana PHR (Pajak Hotel dan Restoran). "*Ya*, masih sedang diperiksa, oleh Jaksa Pak Tangkas," ungkap Ashari Kurniawan saat dikonfirmasi kemarin.

Mantan Kepala Bappeda Bali ini diperiksa mulai pukul 13.00, dan belum selesai sampai pukul 17.30. dia masih di ruang "biru" Kejati Bali menjalani pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan Jaksa Tangkas mengatakan memang jadwalnya memeriksa Cok Pemayun kemarin. "*Ya*, kami akan periksa pukul 13.00," ujar Tangkas.

Kajati Bali Momock Bambang Sumiarso juga membenarkan memang sedang mendalami dugaan kasus penyimpangan PHR. "Namun belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH)," jelasnya.

Koran ini juga sempat mengkonfirmasi adanya dugaan kasus reklame di Kota Denpasar yang mandeg. Namun Momock mengaku belum tahu. "Saya belum tahu, coba nanti saya cek. Kasus reklame kota Denpasar itu," kilahnya. Sebelumnya Jaksa Made Subawa tidak mau memberikan penjelasan terkait kasus yang digarapnya.

Sedangkan terkait kasus PHR, kasus ini terendus media setelah Anggota Dewan Sentana diperiksa di Kejati. Sentana membawa surat panggilan, tertanggal 30 April 2015. Surat itu bernomor PK-90/P.1.5./Fd.1/04/2015. Yang memangil Sentana selaku Anggota Dewan dari Fraksi gerindra. Dia dipanggil untuk membawa dokumen – dokumen menyangkut penyimpangan dana PHR, termasuk PHR yang dibagikan keenam kabupaten di Bali. Yaitu, Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Jembrana dan Buleleng. **(art/pit)**

Edisi : Rabu, 24 Juni 2015

Hal : 21